

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan social dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi pada intinya kata kunci dari pemberdayaan masyarakat adalah meliputi: proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri.¹

Dengan kata lain keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktifnya pihak yang diberdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Chambers,² pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk

¹ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sleman: Deepublish, 2019), h.8

² Efri Syamsul Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*, (Kediri: FAM Publishing, 2019), h.9

membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered*, *participatory*, *empowerment*, dan *sustainable*. Lebih jauh Chambers menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal.

Lebih jauh menurut Chambers, memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk mengangkat harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memajukan dan memandirikan masyarakat.

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah *community driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat

atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.

Pengertian pemberdayaan masyarakat terus mengalami perkembangan. Bahkan beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan.³ Pertama, dari aspek tujuan, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Kedua, dari aspek proses, pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Ketiga, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur social. Dan keempat, dari aspek cara-cara pemberdayaan, pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi dan komunitas

³ Efri Syamsul Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*, (Kediri: FAM Publishing, 2019), h.11

diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Subejo dan Supriyanto,⁴ mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah bentuk upaya disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal di dalam merencanakan, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *networking* dan *collective action* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, sosial dan ekologi.

2. Hakekat Pemberdayaan Masyarakat

Payne mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) pada hakikatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan kekuatan (daya) untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.⁵ Pemberdayaan dilakukan dengan jalan meningkatkan kapasitas, pengembangan rasa percaya diri untuk menggunakan kekuatan dan mentransfer kekuatan dari lingkungannya. Sebagai suatu proses,

⁴ Subejo dan Supriyanto, Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, <https://subejo.staff.ugm.ac.id> , diakses 08 juni 2020

⁵ Efri Syamsul Bahri, Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan, (Kediri: FAM Publishing, 2019), h.13

pemberdayaan adalah usaha yang terjadi terus menerus sepanjang hidup manusia. Pemberdayaan sebagai sebuah program mempunyai makna bahwa pemberdayaan merupakan tahapan-tahapan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dalam kurun waktu tertentu.

Hakekat pemberdayaan menurut (Sobirin) dalam (Bahri, Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi) ada 5 (lima).⁶ Pertama, pemberdayaan adalah proses, yaitu perubahan dari status yang rendah ke status yang lebih tinggi. Kedua, pemberdayaan adalah metode, yaitu sebagai suatu pendekatan agar masyarakat berani mengungkapkan pendapatnya. Ketiga, pemberdayaan adalah program, yaitu sebagai tahapan-tahapan yang hasilnya terukur menuju kehidupan rakyat yang mandiri dan sejahtera. Keempat, pemberdayaan adalah gerakan, yaitu membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kelima, pemberdayaan adalah pemberian otorisasi yaitu menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan. Jadi pemberdayaan harus dilihat secara komperenshif dengan produk akhir

⁶ Efri Syamsul Bahri, Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan, (Kediri: FAM Publishing, 2019), h.1

masyarakat menjadi berdaya, memiliki otoritas, menjadi subjek dalam pembangunan, dan kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan pada hakikatnya merupakan gerakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Menurut Suyono, gerakan masyarakat berbeda dengan membuat model percontohan secara ideal, selanjutnya setelah teruji baru disebar luaskan. Berbeda dengan strategi gerakan masyarakat ditempuh melalui jangkauan kepada masyarakat seluas-luasnya atau sebanyak-banyaknya.

Benih pemberdayaan ditebar kepada berbagai lapisan masyarakat. Masyarakatnya akhirnya akan beradaptasi, melakukan penyempurnaan dan pembenahan yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kebutuhan, serta cara atau pendekatan mereka. Dengan demikian model atau strategi pemberdayaan akan beragam, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal.⁷

Pemberdayaan masyarakat memerlukan strategi yang tepat, karena kesalahan pendekatan justru dapat berakibat fatal. Demikian juga

⁷ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.89

kesalahan dalam menangkap permasalahan, mengakibatkan kesalahan dalam menentukan cara pemecahannya. Menurut Ginanjar Kartasmita, implementasi pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga upaya:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.
 - 2) Memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menyediakan lingkungan, prasarana, dan sarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat.
 - 3) Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi terhadap yang lemah.⁸
4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat
- Pemberdayaan masyarakat yang efektif adalah yang dilakukan secara bertahap. Tujuan adanya tahapan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyiapkan diri untuk mengelola aktifitas pemberdayaan.

⁸ Sri Najiati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut, (Bogor: Wetland Internasional- IP, 2005), h.60

Pemberdayaan menurut Wrihantolo dan Dwidjowijoto adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan, yaitu:⁹

- a) Tahap Penyadaran, pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Prinsip dasarnya adalah membuat mereka mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (tidak dari orang luar). Tahap penyadaran atau tahap pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya atau pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
- b) Tahap Pengkapasitasan, inilah yang sering disebut *capacity building*, atau dalam bahasa yang sederhana memungkinkan atau

⁹ Efri Syamsul Bahri, Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan, (Kediri: FAM Publishing, 2019), h.15

enabling. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Proses pengkapasitasan terdiri atas tiga jenis, yaitu: manusia, organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia dalam arti memampukan manusia baik dalam konteks individu maupun kelompok. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas tersebut. Pengkapasitasan ketiga adalah sistem nilai, setelah orang dan wadahnya dikapitasikan, sistem nilainya pun demikian. Sistem nilai adalah aturan main.

- c) Tahap Pemberian daya atau *empowerment* dalam makna sempit. Pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Pokok gagasannya adalah bahwa proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kecakapan penerima.

Menurut M.Ayub Padangaran pengembangan masyarakat merupakan proses penguatan pemberi kemandirian dan keberadaan masyarakat, tahapan dalam pemberdayaan merupakan sebuah upaya untuk memaksimalkan segala sumber daya yang ada dan di miliki oleh suatu daerah agar bisa di manfaatkan secara optimal, tahapan pemberdayaan antara lain:¹⁰

- 1) Tahap penyadaran, yaitu tahap dimana masyarakat di beri pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik.
- 2) Tahap pengkapasitasan (*capacity building*) atau memampukan (*enebling*), yaitu tahap dimana masyarakat di beri pengetahuan, keterampilan, fasilitas, organisasi, dan sistem nilai atau aturan main.
- 3) Pendayaan (*Empowerment*), yaitu tahap dimana masyarakat di beri kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan,

¹⁰ Ayub M.Padangaran, Manajemen Proyek Pengembangan masyarakat, (Unhalu Perss, 2011)

keterampilan dan kemampuan yang telah mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri.

Dimana berdasarkan beberapa tahapan di atas, tahapan yang sesuai dengan studi dalam penelitian ini adalah tahap penyadaran, pengkapaistasan, dan tahap pendayaan, dimana Ayub.M, Padangaran dalam bukunya menganggap bahwa pengembangan masyarakat merupakan proses penguatan pemberi kemandirian dan keberadaan masyarakat, tahapan dalam pemberdayaan merupakan sebuah upaya untuk memaksimalkan segala sumber daya yang ada dan dimiliki oleh suatu daerah agar bisa di manfaatkan secara optimal.

5. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan di dalam masyarakat dibentuk guna potensi yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat potensi dan meningkatkan modal sosial serta

membentengi masyarakat dari segala macam ketertindasan dalam aspek aspek ekonomi.¹¹

Menurut Edi Suharto,¹² pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. Yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

B. Pengelolaan Lingkungan

¹¹ <https://pendidikan.co.id/pengertian-pemberdayaan-masyarakat/> diakses pada 09 Juni 2020

¹² Efri Syamsul Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi*, (Kediri: FAM Publishing, 2013), h.23

1. Pengertian Pengelolaan Lingkungan

Secara harfiah berarti ruang lingkup atau sekitar atau alam sekitar atau masyarakat sekitar, dan lain-lain. Lingkungan juga diartikan sebagai kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, seperti tanah, air, energi surya, mineral serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun yang hidup dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia, seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan dapat juga diartikan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.¹³

Lingkungan di Indonesia sering juga disebut lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, didefinisikan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan

¹³ Dantje T. Sembel, Toksologi Lingkungan, (Yogyakarta: Andi, 2015), h.1-2

peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁴

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya.
- 2) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- 3) Mewujudkan manusia sebagai Pembina lingkungan hidup.
- 4) Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan penanggulangan dampak negatif terhadap kegiatan manusia yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lingkungan. Lingkungan yang tercemar akibat kegiatan manusia maupun proses alam akan berdampak negatif pada kesehatan, kenikmatan

¹⁴ Natsir Abduh, Ilmu dan Rekayasa Lingkungan, (Makassar: CV Sah Media, 2018), h.10

hidup, kemudahan, efisiensi, keindahan serta keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam.

2. Pengelolaan Sampah

Pada hakikatnya permasalahan sampah terkait erat dengan paradigma manusia sebagai diri pribadi maupun sebagai suatu kumpulan manusia (masyarakat). Lalu dengan paradigma yang masih sederhana, sampah yang dihasilkan tersebut dipandang sebagai sesuatu yang tak bernilai sama sekali, dan akhirnya dibuang. Dalam pandangan ini, pengelolaan sampah dilihat sebagai kegiatan yang justru merugikan, sebab akan menyita waktu, tenaga bahkan membutuhkan uang.

Lebih jauh lagi, dalam pandangan Setyo Purwendo dan Nurhidayat menyatakan sebenarnya akar dari permasalahan sampah yang pelik ini erat kaitannya dengan budaya masyarakat dan didukung dengan lemahnya pengaturan (regulasi) pemerintah tentang pengelolaan sampah. Budaya masyarakat ini tercermin dari kurangnya disiplin dan masih rendahnya menjaga lingkungan hidup. Adapun kelemahan pengaturan pemerintah bisa dilihat dari kurangnya koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan hal ini. Di samping itu, aspek yang tak kalah pentingnya adalah pola pikir masyarakat yang masih beranggapan bahwa mengelola sampah

merupakan kegiatan yang menghabiskan waktu, uang dan tenaga.¹⁵

Hal tersebut cukup tepat dan beralasan, setidaknya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 memberikan alasan yang senada, bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, dengan demikian pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat merubah perilaku masyarakat. Oleh sebab itu dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif dan efisien.¹⁶

Pengelolaan sampah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dinyatakan sebagai usaha dan kegiatan yang sistematis, menyeluruh,

¹⁵ Setyo Purwendo dan Nurhidayat, Mengelolah Sampah Untuk Pupuk Pestisida Organik (Penebar Swadaya: Jakarta,2006), h.10

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menimbang huruf b, c dan d

dan berkesinambungan yang terdiri dari dua bagian yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan Undang-Undang ini pula diketahui bahwa sampah yang dikelola adalah sampah yang digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu: sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga maupun sampah spesifik.¹⁷

Adapun asas pengelolaan sampah berdasarkan Undang-undang ini adalah pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.¹⁸ Sementara pengelolaannya ditujukan pada peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.¹⁹

Berdasarkan pada pengertian pengelolaan sampah pada Pasal 1 poin 5, bahwa pengelolaan sampah adalah semua kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan dan dilaksanakan dalam rangka

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. Pasal 1 poin 5

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. Pasal 3

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. Pasal 4

mempelakukan dan menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Yudhi mendefinisikan kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.²⁰

Oleh sebab itu, hal-hal terkandung di dalam pengertian pengelolaan sampah meliputi semua kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengelolaan dan pemrosesan akhir atau pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat.

Model pengelolaan sampah di Indonesia ada dua macam, yaitu urungan dan tumpukan. Model pertama merupakan cara yang paling sederhana, yaitu sampah dibuang di lembah atau cekungan tanpa memberikan perlakuan. Urungan atau model buang dan pergi ini bisa saja dilakukan pada lokasi yang tepat, yaitu bila tidak ada pemukiman di bawahnya, tidak menimbulkan polusi udara, polusi

²⁰ Yudhi Kartikawan, Pengelolaan Persampahan, (Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, 2009).

pada air sungai, longsor atau estetika. Model ini umumnya dilakukan untuk suatu kota yang volume sampahnya tidak begitu besar.²¹ Pengelolaan sampah yang kedua lebih maju dari cara urungan, yaitu tumpukan. Model ini bila dilaksanakan secara lengkap sebenarnya sama dengan teknologi aerobik. Hanya saja tumpukan perlu dilengkapi dengan unit saluran air buangan, pengolahan air buangan (*leachate*), dan pembakaran eksek gas metan (*flare*).

Model yang lengkap ini telah memenuhi prasyarat kesehatan lingkungan. Namun, sayangnya model tumpukan ini umumnya tidak lengkap, tergantung dari kondisi keuangan dan kepedulian pejabat daerah setempat akan kesehatan lingkungan dan masyarakat.²²

3. Bank Sampah

Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif di dalamnya. Bank sampah akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar (pengebul atau lapak) sehingga

²¹ HR Sudrajat, Mengelola sampah Kota, (Bogor: Niaga Swadaya, 2006), h.10

²² Ibid, h.11

masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dan menabung sampah. Sampah yang disetorkan oleh nasabah idealnya sudah terpilah menjadi kategori yang umum. Semisal sampah organik, dan plastik. Pengkategorian sampah harus sesuai dengan kemampuan dan kemauan masyarakat yang menjadi nasabah. Setiap kategori sampah memiliki harga masing-masing.²³

Bank sampah dapat dikatakan sebagai tempat transaksi dalam meningkatkan pendapatan. Menurut Bambang Suwerda,²⁴ bank sampah adalah suatu tempat dimana terdapat kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank.

Sedangkan menurut Sucipto yaitu pengelolaan sampah pemukiman dengan cara menerapkan strategi 3R (*Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle*) kemudian masyarakat menyetorkan sampah ke badan yang dibentuk dan disepakati bersama,²⁵ berdasarkan penjelasan pakar diatas, dapat disimpulkan bahwa bank sampah adalah

²³ <https://banksampahsyariahblog.wordpress.com/mengenal-bank-sampah/>, di akses 20 mei 2023 pukul 10:50 WIB

²⁴ Bambang Suwerda, *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan)*, (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2012), h.22

²⁵ C.D Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, (Yogyakarta: Goysen, 2012), h. 204

tempat pengelolaan sampah terpadu dengan sistem mekanisme perbankan dalam lingkungan masyarakat.

Bank sampah merupakan konsep yang sederhana dan sangat mudah dilakukan atau diterapkan di berbagai wilayah dengan karakteristik warga yang beragam. Bank sampah merubah paradigma sampah yang selama ini dianggap kotor dan menjijikkan menjadi hal yang bersih. Konsep ini akan muncul ketika dijadikan satu kata dengan bank, menjadi bank sampah. Bank sampah akan menaikkan harkat sampah dari kluster kotor menjadi kluster bersih. Bank sampah memberi manfaat edukasi bagi masyarakat untuk membiasakan menabung, meskipun dalam bentuk sampah, lingkungan rumah menjadi bersih dari sampah, mengurangi pencemaran lingkungan terutama pencemaran udara adanya sampah plastik yang dibakar, memudahkan masyarakat dalam mengelola sampah organik.²⁶

Peranan bank sampah terdapat pada teori pertukaran, teori tersebut adalah rewards dan punishment. Bank sampah tidak dapat melakukan punishment kepada masyarakat, sehingga bank

²⁶ Bambang Suwerda, Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan), (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2012), h.68-69

sampah menggunakan sistem rewards. Proses pengelolaan sampah dengan tabungan tersebut dinilai dengan uang atau rupiah mengubah paradigma masyarakat tentang sampah.²⁷ Oleh karena itu perlu adanya rewards bukan punishment yang ditetapkan oleh pengelola bank sampah untuk membawa keberhasilan bank sampah tersebut.

4. Tujuan Dan Manfaat Bank Sampah

Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu menangani pengelola sampah. Tujuan bank sampah selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis. Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka.²⁸

²⁷ Ni Made Via P, dan I Nengah Kartika, “Analisis Pengaruh Program Bank Sampah Terhadap Pendapatan Nasabah Bank Sampah di Kota Denpasar”, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud, Vol.7 No.6, 2016, h.1261

²⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_sampah diakses pada 12 Juni 2021

C. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Bank Sampah

Pemberdayaan masyarakat adalah fasilitasi guna meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengendalikan keadaan sosial ekonomi, dan politik yang sangat diperlukan dalam upaya memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat. Program bank sampah merupakan program pemberdayaan lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan kemandirian masyarakat agar mampu memecahkan masalah sampah dan potensi yang ada.

Dalam hal ini, pemberdayaan melalui program bank sampah lebih terkait kepada aspek *facilitating* atau pemberian kapasitas kepada masyarakat dalam hal pendampingan pembentukan bank sampah sehingga akhirnya bank sampah tersebut dapat berdiri dan berjalan dengan baik. Dengan demikian, pada akhirnya masyarakat dapat mengelola bank sampah secara mandiri dan mengambil manfaat dari bank sampah tersebut dan menghasilkan keberdayaan mereka sendiri dalam hal mengelola sampah.

Program bank sampah ini dirasa sangat perlu dilakukan dikarenakan mampu mengatasi peningkatan volume sampah. Dengan melibatkan masyarakat maka akan membantu dalam mengatasi persoalan sampah dan

juga manfaat ekonomis dari sampah yang dihasilkan, lebih lagi meningkatnya kesadaran masyarakat ini akan mengurangi beban pencemaran lingkungan untuk masa kini dan masa yang akan datang.²⁹

Pemberdayaan masyarakat memerlukan *breakeven* dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, di mana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

²⁹ Wuri Sulistiyorini Purwanti, Sumartono, Bambang Santoso Haryono, "Perencanaan Bank Sampah Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kepanjen Malang", E-Jurnal Administrasi Publik Unbra, Vol.5, No. 1, 2015

Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya.

